



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2021 - 2022**

KAMIS, 7 OKTOBER 2021

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**

- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan anugerahNya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Masa Persidangan I telah berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2021 dan akan berakhir pada hari ini. Walaupun awal persidangan dilakukan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, DPR RI telah dapat mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusionalnya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Atas nama Pimpinan DPR dan segenap Anggota DPR, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kiwirok, Kabupaten Pengunungan Bintang, Papua yang telah menimbulkan korban jiwa dari pihak tenaga kesehatan dan anggota TNI.

Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Persidangan I, DPR RI telah melakukan evaluasi atas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 dan telah menetapkan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2021 yang semula terdiri atas 33 (*tiga puluh tiga*) RUU menjadi 37 (*tiga puluh tujuh*) RUU.

Evaluasi Prolegnas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan kinerja pembahasan RUU dalam situasi Pandemi Covid-19.

Dengan adanya Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2021 diharapkan produk legislasi yang dihasilkan akan efektif untuk melaksanakan kebijakan negara yang sangat dibutuhkan saat ini.

Dalam Masa Persidangan I ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah dan dengan melibatkan DPD, telah menyelesaikan

pembahasan 3 (tiga) RUU yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, yakni:

1. RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters); dan
2. RUU tentang Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
3. RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

DPR RI juga telah menerima 3 (*tiga*) Surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 3 (tiga) RUU, yaitu

1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;

DPR RI akan segera membahas RUU tersebut untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pada masa persidangan ini DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, yang dalam pelaksanaannya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Selain itu, DPR RI dan Pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 menjadi Undang-Undang. DPR bersama Pemerintah telah menyepakati berbagai asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022, yakni:

- pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen,
- inflasi sebesar 3,0 persen,
- nilai tukar rupiah Rp. 14.350 per dollar AS,
- suku bunga SBN 10 tahun 6,8 persen, serta

- lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing sebesar 703.000 barel per hari (BPH) dan 1.036.000 BPH.

Mengacu pada asumsi ekonomi makro tersebut, DPR RI menyetujui kebijakan APBN yang akan dijalankan Pemerintah setahun mendatang dengan alokasi belanja negara sebesar Rp2.714,15 triliun. Anggaran Pendidikan sebesar Rp542,83 triliun atau 20,0 persen dari total belanja dan Anggaran Kesehatan sebesar Rp256,01 triliun atau 9,4 persen dari total belanja.

DPR RI mendorong Pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN Tahun Anggaran 2022, agar responsif dalam menghadapi dinamika dan risiko Pandemi yang dapat berubah-ubah.

DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi risiko Pandemi Covid-19 dan terus melakukan perbaikan strategi dalam penanganan Covid-19 sehingga mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Persidangan I ini, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan fungsi pengawasan melalui rapat-rapat bersama dengan mitra kerja, baik terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 di berbagai bidang dan sektor, maupun penanganan berbagai isu dan permasalahan, termasuk pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap AKD.

Pada Masa Persidangan I ini DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

1. 5 (*lima*) Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
2. 1 (*satu*) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
dan
3. 7 (*tujuh*) Calon Hakim Agung.

DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 8 (*delapan*) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas, DPR RI mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, namun demikian DPR RI mengingatkan agar sekolah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari Satgas Penanganan Covid-19.

Pemerintah agar terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, hal ini penting untuk memitigasi penyebaran Pandemi Covid-19.

Permasalahan kelebihan kapasitas atau over capacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi persoalan serius dan mendesak untuk diatasi. Permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas telah banyak menimbulkan dampak lain, untuk itu DPR RI telah memberikan perhatian khusus dan mendengarkan serta memperhatikan masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang berwenang baik Kepolisian, Kejaksaan Agung dan BNN untuk mendapatkan solusi terbaik.

DPR RI memberikan apresiasi kerja keras Pemerintah hingga terselenggaranya PON XX Papua di tengah Pandemi Covid-19. DPR RI juga mengapresiasi upaya Pemerintah beserta TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan maksimal terhadap penyelenggaraan acara tersebut.

PON XX Papua, merupakan PON yang pertama kali diselenggarakan di Tanah Papua, dan menjadi kebanggaan kita semua. Melalui PON XX Papua, selain untuk keberlanjutan pembinaan prestasi olahraga nasional, juga akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan anak bangsa melalui olahraga untuk kemajuan Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Peran diplomasi parlemen, dilaksanakan DPR RI dengan mengirim delegasi untuk menghadiri berbagai pertemuan kerja sama antarparlemen.

Delegasi DPR RI telah menghadiri:

1. Sidang Umum ke-42 AIPA yang secara virtual dilaksanakan di Brunei Darussalam pada 23-25 Agustus;

2. Sidang the 5th *World Conference of Speakers of Parliament* pada 7-8 September di Austria.
3. Menyelenggarakan Sidang *Executive Committee South East Asian Against Corruption* pada 23 September, dan
4. Bekerjasama dengan IPU menyelenggarakan the 1st *Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs* pada 28-30 September yang dilaksanakan secara virtual.

Peran diplomasi DPR RI diarahkan untuk menjaga kepentingan nasional dan menyampaikan pandangan Indonesia dalam membangun komitmen kehidupan antar negara yang damai, adil dan sejahtera untuk semua bangsa.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang telah dilakukan Pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan Pandemi Covid-19.

Gotong royong, Kerja bersama ini, agar dapat terus diperkuat oleh seluruh anak bangsa dan komponen bangsa. Kita tidak dapat mengharapkan bangsa dan negara lain untuk membantu kita dalam menghadapi permasalahan situasi Pandemi Covid-19.

Dengan kesadaran, komitmen, dan kerja bersama, kita dapat membangun kekuatan nasional yang dapat mengatasi berbagai permasalahan bangsa dan negara termasuk Pandemi Covid-19.

Pimpinan DPR RI mengundang seluruh Anggota DPR RI agar dapat ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan Pandemi Covid-19 dengan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan, ikut mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

Melalui Rapat Paripurna ini, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Kepada Yang Terhormat Anggota DPR-RI, kunjungi dan sapa rakyat di dapil masing-masing, sampaikan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh Dewan, dan persatukanlah rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia yang sejahtera, maju, dan berbudaya.

Kami ucapkan selamat bekerja pada Masa Reses, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbinganNya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. (H.C) PUAN MAHARANI**

LAMPIRAN:

5 (*lima*) Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yaitu:

1. Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (Unsur Masyarakat)
2. Ederiman Butar Butar (Unsur Pemerintah)
3. M Rini Purwandari (Unsur Masyarakat)
4. Mohamad Kusnaeni (Unsur Masyarakat)
5. Mohammad Rohanudin (Unsur RRI).

7 (*tujuh*) Calon Hakim Agung, yaitu:

1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
2. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
4. Suharto, S.H., M.Hum. (Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
5. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
6. Dr. H. Haswandir, S.H., M.Hum., M.M. (Calon Hakim Agung Kamar Perdata)
7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Calon Hakim Kamar Militer).

1 (satu) Calon Anggota BPK RI, yaitu:

1. Nyoman Adhi Suryadnyana ., S.E., M.E.